

OMBUDSMAN BABEL JEMBATANI MASYARAKAT SAMPAIKAN KELUHAN, GELAR PVL ON THE SPOT DI DESA-DESA

Senin, 06 September 2021 - Umi Salamah

BANGKAPOS.COM, BANGKA - [Ombudsman](#) RI [Perwakilan](#) Kepulauan [Bangka Belitung](#) mengadakan kegiatan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) On the Spot yang berlokasi di Kantor Kepala Desa [Balunijuk](#) beberapa waktu lalu.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat agar dapat menyampaikan keluhan kesah seputar pelayanan publik yang dialaminya. Ombudsman Babel menjembatani keluhan masyarakat agar ada solusi atas harapan mereka terkait perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Beberapa substansi laporan masyarakat yang diadukan kepada [Ombudsman](#) Babel, seperti agraria, lingkungan hidup, energi dan listrik, dan sebagainya.

"Ombudsman Babel pada tahun ini ingin menjangkau keluhan masyarakat pedesaan terkait pelayanan publik sekaligus menyosialisasikan tentang [Ombudsman](#)" ujar [Shulby Yozar Ariadhy](#), Kepala [Perwakilan Ombudsman](#) Babel dalam rilis kepada bangkapos.com, Minggu (5/9/2021).

"Kami melihat antusiasme masyarakat cukup baik hal ini dapat dilihat dari jumlah pengaduan yang disampaikan."

"Kami menerima sekitar 30 pengaduan masyarakat, tentu akan kami lakukan verifikasi syarat formil dan materiil untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Selain itu, Ombudsman Babel menyoroti masih adanya tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh oknum penyelenggara pelayanan publik, namun hal tersebut dianggap lumrah baik oleh masyarakat ataupun oknum petugas.

"Kami melihat ada kultur memaklumi tindakan maladministrasi ketika mereka mendapatkan pelayanan dari beberapa instansi pelayanan publik tertentu."

"Hal ini terlihat seperti sesuatu yang lumrah, seperti masyarakat yang menerima pelayanan harus memberikan uang rokok, uang bensin, uang lelah, dan sebagainya jika ingin pengurusan pelayanan berjalan lancar," katanya.

Padahal hal-hal tersebut bukan kewajiban masyarakat pengguna pelayanan publik untuk melakukan hal demikian. Kalau ada hal yang menjadi kewajiban, misalnya biaya materai, silakan sampaikan saja kepada masyarakat namun harus sesuai kewajaran atau kepatutan.

"Gambaran ini menjadi bagian penting bagi [Ombudsman](#) Babel untuk menyosialisasikan. Mari penyelenggara pelayanan serta masyarakat, kita sadari apabila kultur seperti demikian kita biarkan, maka potensi gerbang korupsi akan terjadi saat ada kesempatan yang lebih besar nanti. Jadi, mari kita biasakan sikap anti terhadap Maladministrasi sekecil apapun itu " kataYozar.

Kegiatan PVL On The Spot di pedesaan akan terus dilakukan oleh [Ombudsman](#) Babel mengingat dari jumlah pengaduan yang diterima cukup banyak. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut tentunya akan selalu menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian, pada masa pandemi Covid-19, [Ombudsman](#) Babel dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Bumi Serumpun Sebalai.